

JEPANG DALAM ALIANSI TIGA NEGARA

**Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai
salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Sastra**



PROGRAM STUDI BAHASA DAN SAstra JEPANG

FAKULTAS SAstra

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2006

Halaman Persetujuan Pembimbing

JEPANG DALAM ALIANSI TIGA NEGARA

Oleh

SANTI OKTAVIA

NIM: 99111137

disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi Sarjana, oleh:

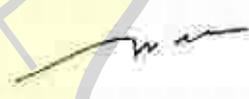
Mengetahui

Ketua Jurusan Sastra Jepang

Pembimbing I



(Syamsul Bahri, S.S)



(Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd)

Pembimbing II



(Oke Diah Arini, S.S)

Halaman Pernyataan

JEPANG DALAM ALIANSI TIGA NEGARA

Merupakan karya ilmiah yang saya susun di bawah bimbingan Ibu Nani Dewi Sunengsih, S.S, MPd. dan Ibu Oke Diah Arini, S.S. tidak merupakan jiplakan skripsi sarjana atau karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, dan isinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 10 Juli 2006

SANTI OKTAVIA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada juru selamatku terkasih, Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan kemurahan-Nya maka penulis dapat merampungkan skripsi berjudul Jepang dalam Aliansi Tiga Negara. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Sastra Jurusan Sastra Jepang di Universitas Darma Persada.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedekat-mungkin-dalamnya kepada:

1. Ibu Nani Dewi S. S.S, MPd, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan dorongan, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
2. Ibu Oke Diah Arini, S.S, selaku dosen pembaca yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Syamsul Bahri, S.S, selaku Ketua Jurusan Sastra Jepang dan ketua sidang.
4. Ibu Metty Suandany, S.S, selaku panitera sidang.
5. Ibu Dra, Yuliasih Ibrahim selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama menjalankan pendidikan di Universitas Darma Persada.

6. Ibu Albertine S. Minderop, M.A. selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Darma Persada.
7. Seluruh Staf Pengajar Universitas Darma Persada yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti pendidikan pada Jurusan Sastra Jepang di Universitas Darma Persada.
8. Seluruh Staf Sekretariat Universitas Darma Persada.
9. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Darma Persada.
10. Keluargaku tercinta, Papa dan Mama atas doa, dukungan, bantuan dan kepercayaannya selama ini, juga buat Irman (my younger bro) buat bantuannya.
11. Teman-teman yang telah mengisi hari-hari semasa kuliah, Spika, Dian, Neni, Renida, Ucup, Abu,



ABSTRAK

SANTI OKTAVIA, 99111137, **JEPANG DALAM ALIANSI TIGA NEGARA.**

Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang, Fakultas Sastra, Universitas Darma

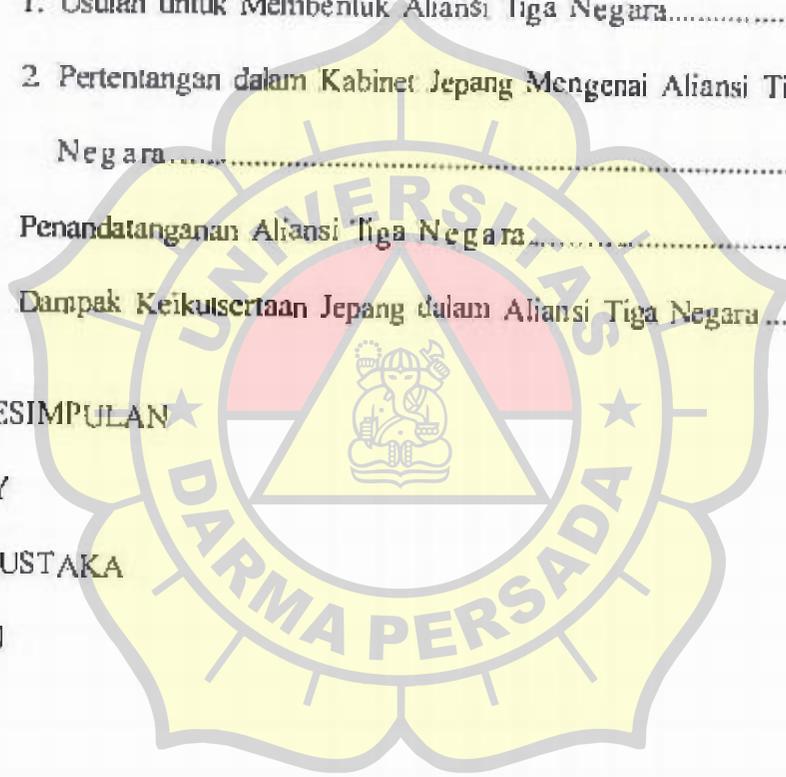
Persada, Jakarta, Juli 2006.

Dengan mengangkat tujuan mendirikan Orde Baru di Asia Timur dan menjalankan ekspansi militernya, membuat Jepang diisolasi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan dunia internasional. Keadaan ini mendorong Jepang untuk bekerjasama dengan negara-negara ekspansionis di Eropa, yaitu: Jerman dan Italia. Kemudian dengan dilandasi oleh persamaan ideologis dan politik luar negeri agresif yang dijalankan ketiga negara ini, maka pada tahun 1936 Jepang menandatangani Perjanjian Anti-Komintern bersama dengan Jerman dan Italia untuk menentang komunisme dan Uni Soviet. Hubungan Jepang, Jerman dan Italia kemudian diperkuat setelah pada tanggal 27 September 1940, ketiga negara menandatangani perjanjian kerjasama militer dalam Aliansi Tiga Negara. Keikutsertaan Jepang dalam Aliansi Tiga Negara telah menjadi salah satu halangan/rintang dalam negosiasi damai dengan Amerika Serikat, dan pada akhirnya secara tidak langsung membawa Jepang berperang secara terbuka dengan Amerika Serikat.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Ruang Lingkup	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II KERJASAMA JEPANG DENGAN NEGARA-NEGARA FASIS	8
A. Fasisme Jepang	8
1. Pengertian Fasisme	8
2. Fasisme Jepang	9
a. Awal Mula Fasisme di Jepang	11

b. Fasisme Militer.....	12
B. Perjanjian Anti Komintern.....	15
BAB III JEPANG DALAM ALIANSI TIGA NE G A RA.....	26
A. Proses Keikutsertaan Jepang dalam Aliansi Tiga Ne gara.....	27
1. Usulan untuk Membentuk Aliansi Tiga Negara.....	27
2. Pertentangan dalam Kabinet Jepang Mengenai Aliansi Tiga Negara.....	32
B. Penandatanganan Aliansi Tiga Negara.....	47
C. Dampak Keikutsertaan Jepang dalam Aliansi Tiga Negara.....	51
BAB IV KESIMPULAN★	
GLOSSARY	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah Perang Dunia I berakhir dengan Perjanjian Versailles tahun 1919, Jepang bersama-sama dengan negara-negara kapitalis Barat mulai menata kembali perekonomiannya. Untuk itu, mereka mulai memperhatikan kembali daerah-daerah koloni mereka dan berusaha untuk menguasai kembali sumber-sumber bahan mentah serta pasaran bagi barang-barang hasil industrinya baik di Afrika, Asia, khususnya di Cina. Kembalinya negara-negara kapitalis Barat ini di Asia, khususnya di Cina, merupakan saingan bagi Jepang dalam membangun industrilisasinya, terutama karena Jepang hanya memiliki sedikit sumber bahan mentah untuk menunjang industri.

Sementara itu di dalam negeri, ekonomi Jepang mengalami masa-masa yang sulit. Kelesuan ekonomi terus berlangsung sampai memasuki periode Showa. Pada tahun 1927, Jepang mengalami krisis keuangan yang disebut dengan Panik Showa (*Showa Kyoko*), karena secara serentak nasabah-nasabah bank mengambil kembali simpanannya pada bank-bank yang tidak dapat diakui likuiditasnya lagi. Akibatnya banyak bank yang bangkrut.

Kemudian pada tahun 1929, dunia ditandai depresi ekonomi yang hebat yang dikenal dengan nama "Malaise" (*Kinyu Kyoko*). Krisis ekonomi dunia ini dimulai dengan jatuhnya pasar bursa saham Amerika yang membawa dampak jatuhnya perdagangan internasional. Jepang yang masih sangat bergantung pada perdagangan luar negeri terkena dampaknya pula¹ Pada tahun 1930, jumlah pengangguran di Jepang mencapai 1 juta orang, sementara harga barang pertanian, terutama beras dan sutera jatuh ke angka terendah dalam beberapa tahun terakhir. Di beberapa daerah, kaum tani yang miskin tak mampu membayar hutangnya dan terpaksa menjual anak gadis mereka ke rumah prostitusi, sementara anak laki-laki mereka didorong untuk wajib militer di Korea atau Manchuria.²

Kesulitan ekonomi yang dialami rakyat Jepang semakin diperburuk dengan keadaan politik Jepang, karena terjadi penyelewengan dalam kabinet oleh partai-partai politik. Banyak politisi dan partai-partai politik yang korupsi, berkolusi dengan golongan kapitalis (*z ōbatsu*). Akibatnya, rakyat dan terutama kelompok militer tidak puas dengan pemerintahan sipil yang berkuasa, sehingga mulai bermunculan protes-protes anti-pemerintahan dan anti-kapitalis.

Kadaan politik Jepang sampai pada titik di mana protes-protes anti-pemerintahan dan anti-kapitalis tersebut mengancam kelangsungan pemerintahan yang ada dan kebijakan-kebijakan domestik dan luar negeri yang dibuatnya. Sebagai

¹ *Kodansha Encyclopedia of Japan* (Tokyo: Kodansha International Ltd, 1983), vol. 8, hal. 271.

² Akira Iriye, *The Origins of War in Asia and the Pacific*, (London-New York: Cambridge University Press, 1965), hal. 6.

indikasinya adalah mulai muncul aksi-aksi kekerasan seperti pemberontakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok militer dan kelompok sayap kanan/radikal sipil. Kelompok militer mengambil inisiatif untuk melakukan reorganisasi nasional (*kokka kaizo*) dan mengorientasikan kembali kebijakan domestik dan luar negeri Jepang agar terlepas dari pengaruh nilai-nilai Barat, seperti: kapitalisme dan demokrasi. Maka, tokoh-tokoh politik dan pengusaha yang terlibat dalam diplomasi dan kapitalisme internasional akan dibunuh.³

Satu bulan setelah pemerintah Jepang menandatangani perjanjian kelautan yang dilangsungkan di London (*Rondon Kaigi*), tepatnya pada bulan November 1930, Perdana Menteri Hamaguchi dibunuh oleh gerakan sayap kanan radikal. Kejadian ini mendorong aksi-aksi pemberontakan serupa yang memuncak pada Pemberontakan/ Kudeta 26 Februari 1936 (*M Ni Roku Jiken*) yang menandai era kebangkitan militer dan sejak itu militer menjadi suatu kekuatan politik yang mempunyai pengaruh yang dominan dalam pemerintahan.⁴

Krisis ekonomi dan meningkatnya pengaruh militer dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jepang, menyebabkan Jepang melaksanakan ekspansi militer ke Manchuria pada bulan September 1931. Peristiwa ekspansi Jepang ke Manchuria atau yang dikenal dengan "Peristiwa Manchuria" (*Manshu Jiken*) ini didalangi oleh kelompok militer dan kelompok ultranasionalis sayap

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, hal. 6-7.

kanan. Peristiwa Manchuria merupakan kegiatan dari militerisme, imperialisme dan fasisme Jepang. Selain itu, atas inisiatif militer pula Jepang mendirikan negara boneka Manchukuo pada tahun 1932 untuk mengeksploitasi secara besar-besaran sumber-sumber bahan mentah yang dimiliki. Akibat peristiwa ini, Jepang yang dilihat sebagai negara agresor, dikecam oleh Liga Bangsa-Bangsa.

Pada tahun 1933, Jepang akhirnya menarik diri dari keanggotaannya di Liga Bangsa-Bangsa, dan sejak saat itu menjadi semakin terisolasi dari dunia internasional. Di tahun yang sama, pemimpin gerakan Nazi Jerman, Adolf Hitler, meraih kekuasaannya dan segera menjadi ketua perwakilan Jerman yang baru. Sama seperti Jepang, ia membawa negaranya keluar dari Liga Bangsa-Bangsa dan melakukan langkah-langkah domestik untuk mengurangi pengaruh negara-negara demokrasi Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris.⁵

Hubungan Jepang dengan Amerika Serikat dan Inggris pun semakin menjauh ketika pada bulan Desember 1934, Perdana Menteri Okada Keisuke yang baru saja dilantik pada bulan Juli 1934, memutuskan untuk membatalkan Perjanjian Kelautan Washington. Jepang membatalkan perjanjian ini karena perjanjian tersebut dianggap tidak adil, di mana Amerika Serikat dan Inggris membatasi jumlah armada dan kapal laut Jepang dengan rasio 5:5:3 yang artinya armada dan kapal laut Jepang tidak boleh menyamai Amerika Serikat dan Inggris.⁶

⁵ *Ibid.*, hal. 24-25.

⁶ *Encyclopedia, loc. cit.*, vol. 3, hal. 202.

Posisi Jepang yang terisolasi dalam dunia internasional, menyebabkan pemerintah Jepang merasa perlu untuk melakukan koalisi dengan negara-negara lain dengan alasan untuk pertahanan diri terhadap ancaman dari negara lain. Maka, pada tahun 1936, Jepang ikut serta dalam perjanjian anti-komunisme internasional (Perjanjian Anti-Komintern) bersama dengan negara-negara fasis di Eropa (Jerman dan Italia)

Hubungan kerjasama antara Jepang, Jerman dan Italia yang dimulai pada tahun 1936 dengan Perjanjian Anti-Komintern, didasari oleh persamaan ideologis yang muncul di ketiga negara sebagai reaksi menentang komunisme dan kapitalisme internasional. Ketiga negara juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk melaksanakan rencana imperialisasi/ekspansi di benua masing-masing dan mendirikan "Orde Baru di Asia Timur" dan "Orde Baru di Eropa".

Untuk mencapai tujuan ini, maka hubungan antara Jepang, Jerman dan Italia harus diperkuat dalam suatu kerjasama militer Aliansi Tiga Negara. Usulan untuk memperkuat hubungan dengan Jerman dan Italia didukung oleh Angkatan Darat dan "golongan poros" dalam Kementerian Luar Negeri Jepang.

Persoalan mengenai jadi ikut serta atau tidaknya Jepang dalam Aliansi Tiga Negara, menimbulkan pertentangan dalam kabinet Jepang, antara kelompok pendukung aliansi dan kelompok penentang aliansi. Namun, dengan menguatnya elemen pro-Jerman dalam Angkatan Darat dan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa

yang terjadi di dunia pada masa itu, menyebabkan Jepang akhirnya ikut serta dalam Aliansi Tiga Negara pada tanggal 27 September 1940.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses keikutsertaan Jepang dalam aliansi dengan negara-negara Poros (Jerman dan Italia)?
2. Bagaimana dampak bagi Jepang beraliansi dengan Jerman dan Italia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kronologis keikutsertaan Jepang dalam Aliansi Tiga Negara dilihat dari proses pengambilan keputusan politik luar negeri Jepang.
2. Dampak keikutsertaan Jepang dalam Aliansi Tiga Negara.

D. Ruang Lingkup

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada hubungan kerjasama Jepang dengan negara-negara fasis (Jerman dan Italia) yang dimulai dengan Perjanjian Anti-Komintern (1936) yang memberikan mereka landasan ideologis bersama menuju suatu kerjasama militer yang lebih kuat dalam Aliansi Tiga Negara (1940).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode penelitian kepustakaan bersifat deskriptif analisis.

F. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Memaparkan tentang kerjasama Jepang dengan negara-negara fasis (Jerman dan Italia).

Bab III. Membahas tentang Jepang dalam Aliansi Tiga Negara (1940).

Bab IV. Kesimpulan.

